Rumah Niscala: Perancangan Pusat Pemberdayaan Bagi Masyarakat PMKS di Kabupaten Sidoarjo Dengan Konsep *Co-Living House*

Ivana Griselda[1], Nathania Wijaya[2]
[1]Architecture and Sustainable Design, Fakultas Teknik, Calvin Institute of Technology, Indonesia
[2]Lecturer at Calvin Institute of Technology, Indonesia
Email: [1]igriselda50@students.calvin.ac.id, [2]nathania.wijaya@calvin.ac.id

Abstract. *The Sidoarjo District Government, one of the city in East Java Province, is committed in paying attention to people with social welfare problems (PMKS). The existence of PMKS is closely related to the issue of poverty, in the community life of Sidoarjo. The PMKS here includeds poor people who are constrained to study and work and cannot fulfill their physical, spiritual, and social needs. Therefore, the Sidoarjo District Government sees the need to add a social center in the form of a PMKS Community Empowerment Center to accommodate, train, and empower the PMKS community.*
The existence of social centers is quite common in Indonesia, but not all people dare to come. This happens because social centers feels like a prison for its residents. Therefore, Niscala House bear the concept of a Co-Living House, which allows its residents to interact as a community, without putting aside the safety, comfort, and social aspects of its residents. In this house, four types of productive-age PMKS will be given various training and guidance that sharpen their skills. They will also be guided to produce goods and services that can be directly enjoyed by the local community. Not only focusing on WBS, this house is also open to the local community by providing services through the facilities provided including library, community cafe, etc. In the end, Niscala House can become a social center that meets the needs of the PMKS community while contributing to the development of Sidoarjo Regency.

Keywords: *empowerment, social centers, people with social welfare problems*

Abstrak. *Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, berkomitmen untuk dapat memperhatikan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Keberadaan masyarakat PMKS berkaitan erat dengan isu kemiskinan yang tidak luput dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat PMKS termasuk ke dalam kategori penduduk miskin yang terkendala untuk belajar dan bekerja serta tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara jasmani, rohani, maupun sosial. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melihat adanya kebutuhan menambahkan sebuah panti sosial berupa Pusat Pemberdayaan Masyarakat PMKS untuk menampung, melatih, dan memberdayakan masyarakat PMKS.*
Keberadaan panti sosial memang sudah umum di Indonesia, akan tetapi tidak semua masyarakat berani untuk datang. Hal ini dikarenakan panti sosial terkesan seperti penjara bagi penghuninya. Maka dari itu, Rumah Niscala dirancang dengan konsep Co-Living House, yang memungkinkan penghuninya untuk berinteraksi sebagai sebuah komunitas, tanpa mengesampingkan keamanan, kenyamanan, serta aspek sosial dari penghuninya. Dalam panti ini, empat jenis PMKS usia produktif akan diberikan berbagai pelatihan dan bimbingan yang mengasah keterampilan. Mereka juga akan dibimbing untuk menghasilkan barang dan jasa yang hasilnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat sekitar. Tidak hanya fokus bagi WBS, panti ini juga terbuka bagi masyarakat sekitar dengan memberikan pelayanan melalui fasilitas yang disediakan seperti perpustakaan, kafe, dan lainnya. Pada akhirnya, Rumah Niscala dapat menjadi panti sosial yang memenuhi kebutuhan masyarakat PMKS sekaligus berkontribusi bagi perkembangan Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci: *panti sosial, pemberdayaan, masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial*

1. Pendahuluan

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, berkomitmen untuk dapat memperhatikan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018, PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hambatan, kesulitan, atau gangguan yang dimaksud dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, dan keterasingan (Dinas Sosial Buleleng, 2018). Kabupaten Sidoarjo sendiri tidak luput dari isu kemiskinan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.955.002 jiwa, jumlah penduduk miskin di kabupaten ini mencapai 125,69 ribu jiwa per pertengahan 2022 (BPS Kabupaten Sidoarjo, 2023). Penduduk miskin mencakup masyarakat PMKS seperti yang tertera pada tabel 1. Isu kemiskinan ini membuat mereka terkendala untuk belajar dan bekerja, serta tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara jasmani, rohani, maupun sosial.

Tabel 1. Data PMKS
(BPS Provinsi Jawa Timur, 2019)

Masyarakat PMKS	*Jumlah*
Anak terlantar	243
Anak jalanan	145
Wanita Rawan Sosial - Ekonomi	2325
Pengemis	125

Dalam usaha pemerintah memperhatikan masyarakat PMKS, pemerintah juga meresponi tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Fokus pemerintah khususnya terletak pada poin pertama, *no poverty,* yakni bagaimana pemerintah menekan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Poin ketiga, *good health and well-being,* yakni bagaimana pemerintah meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada fasilitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Poin kesepuluh, *reduced inequalities,* yakni bagaimana pemerintah mengurangi kesenjangan secara ekonomi dan sosial di dalam lapisan masyarakat. Sekaligus poin kesebelas, *sustainable cities and communities,* yakni bagaimana pemerintah mewujudkan kota yang berkelanjutan dengan cara yang ramah lingkungan dalam Kabupaten Sidoarjo.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu yang dipaparkan sebelumnya adalah dengan menyediakan sebuah fasilitas publik yang memperhatikan elemen keberlanjutan, untuk menampung dan melatih masyarakat PMKS. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai sarana pemberdayaan, yakni pengembangan kemandirian melalui kegiatan pelatihan, pengembangan pengetahuan, dan penguatan kemampuan bermasyarakat (Fauziah, 2020). Pemberdayaan adalah suatu langkah untuk dapat memperlengkapi mereka dengan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan/target pasar dari industri di Kabupaten Sidoarjo. Fasilitas pemberdayaan ini termasuk ke dalam tipologi bangunan panti sosial yang di dalamnya akan memberikan delapan jenis pelayanan sosial yaitu: (1) asrama, (2) kebutuhan pangan, (3) konseling, (4) kesehatan, (5) pendidikan, (6) keterampilan, (7) keagamaan, (8) rekreasi (Sukoco, 2003). Dengan bekal ini, masyarakat PMKS dapat didorong untuk kembali terjun ke dalam kehidupan bermasyarakat, melanjutkan hidup dengan mandiri, dan berkontribusi bagi perekonomian kabupaten.

Sebenarnya, keberadaan panti sosial sudah umum di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi, pada realitanya, masyarakat PMKS takut untuk datang ke dalam panti karena panti memberikan kesan seperti penjara bagi mereka. Sarana maupun sistem yang disediakan di dalam panti juga sering kali kurang menunjang kebutuhan pengguna (disebut juga Warga Binaan Sosial/WBS). Kondisi ini membuat proses pembinaan tidak terlaksana dengan efektif, sehingga membuat masyarakat, baik yang sudah pernah dibina maupun yang belum pernah dibina, lebih memilih untuk kembali ke jalanan. Di sisi lain, pembinaan yang tidak efektif juga tidak menutup kemungkinan membuat WBS yang sedang dibina lebih memilih berlama-lama di dalam panti karena mendapatkan tempat tinggal gratis. Alhasil, proses keluar-masuk penghuni panti juga tidak berjalan dengan baik dan membuat panti malah menjadi kelebihan kapasitas.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk memberikan solusi berupa rancangan arsitektur terhadap sebuah bangunan panti sosial pusat pemberdayaan masyarakat PMKS, yang dinamakan "Rumah Niscala". Studi ini secara khusus untuk menghasilkan sebuah rancangan panti pemberdayaan yang aman, inklusif, berkelanjutan, serta memfokuskan pada kebutuhan pengguna dan menjawab kebutuhan kota.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi terhadap berbagai preseden panti sosial di dalam dan luar negeri. Studi yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap fasilitas, sistem, *stakeholder*, serta aspek keberlanjutan yang diterapkan setiap panti. Dari data yang diperoleh, dilakukan analisis untuk melihat kelebihan, kekurangan, serta hal yang dapat diperbaiki dan diterapkan dari preseden tersebut ke dalam perancangan Rumah Niscala. Selain itu, data lahan juga dikumpulkan melalui observasi langsung maupun secara daring pada laman *Google Maps*. Studi yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap kondisi, batas, aksesibilitas, serta peraturan daerah yang mengikat lahan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk melihat kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari lahan, serta strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya di dalam perancangan Rumah Niscala. Seluruh hasil analisis kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan konsep perancangan dari panti sosial Rumah Niscala.

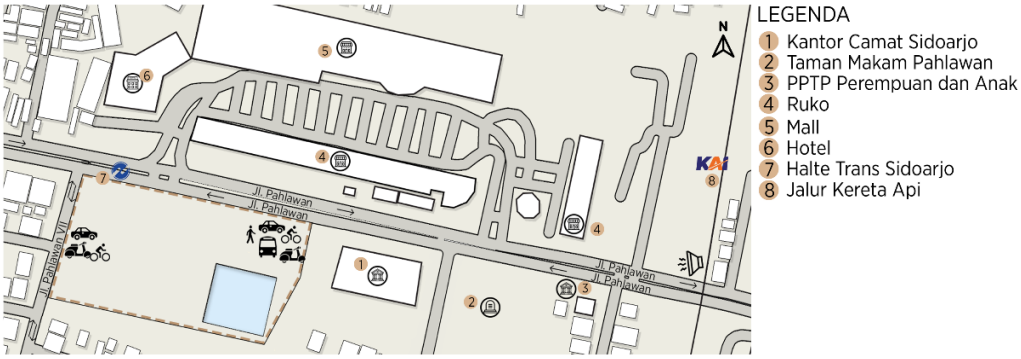
3. Hasil & Diskusi/ Pembahasan

3.1. Konsep dan Lokasi Proyek

Rumah Niscala perlu dirancang dengan mengangkat konsep *Communal Living (Co-Living) House.* Keberadaan Rumah Niscala akan menjadi sebuah tempat tinggal baru bagi penghuni yang akan dibimbing di dalamnya. Akan tetapi, lebih dari sekadar memberikan sebuah tempat tinggal yang membuat penghuninya bersifat individualis, penerapan konsep *co-living* akan mendorong setiap penghuni untuk juga berinteraksi sebagai sebuah komunitas. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan menyediakan ruang komunal bagi antar penghuni seperti taman, lapangan, dan juga area makan, di samping ruang pribadi bagi setiap penghuni (Ataman and Dino, 2019). Dengan demikian, Rumah Niscala akan memberikan kesan lebih terbuka dan *welcoming* bagi WBS. Di dalam konsep *co-living*, Rumah Niscala juga perlu memperhatikan kriteria bangunan hijau serta aspek sosial seperti perbedaan gender dan usia penghuni. Selain itu, Rumah Niscala juga harus bisa memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui fasilitas yang disediakan.

Masyarakat yang disasar dalam Rumah Niscala adalah masyarakat PMKS yang masih memiliki potensi untuk bekerja dan belajar serta dapat dibimbing dengan kesadaran dan kemauan diri. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, terdapat 26 jenis, definisi, dan kriteria masyarakat yang dikategorikan sebagai PMKS. Namun, tidak semua jenis PMKS akan tinggal di dalam proyek ini, karena akan mempengaruhi keamanan dan kenyamanan setiap pengguna. Dari 26 jenis PMKS, dipilih empat jenis PMKS yang memiliki pendekatan keterampilan dan cara pembimbingan yang sama. Empat jenis PMKS tersebut adalah remaja yang berada pada usia kerja, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), pengemis, dan pemulung. Panti ini hanya bersifat sementara, di mana mereka akan menyelesaikan sertifikasi pelatihan dan kurikulum yang disediakan dalam durasi enam bulan hingga satu tahun. Setelah itu, penghuni akan disalurkan ke perusahaan, dikembalikan kepada keluarga, atau relokasikan ke rusun-rusun yang sudah disiapkan pemerintah untuk dapat kembali berkarya di dalam masyarakat.

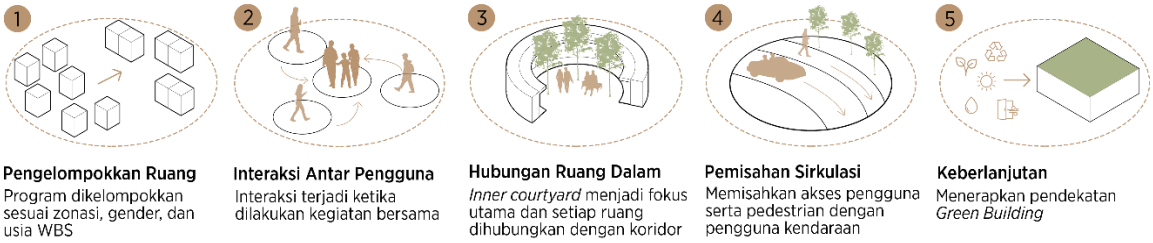
Lokasi lahan yang dipilih berada di tengah Kabupaten Sidoarjo, berhadapan langsung dengan Jl. Pahlawan, yang merupakan jalan provinsi di Kabupaten Sidoarjo. Luasan lahan ini adalah 1,72 Ha, mencakup sebuah danau berukuran 0,2 Ha pada bagian kanan lahan. Lahan ini dipilih karena berada pada tengah kabupaten, dilalui jalur lalu lintas utama kabupaten, dan memiliki aksesibilitas yang tinggi. Lahan ini juga berada bersebelahan dengan Kantor Camat Kabupaten Sidoarjo, sehingga mempermudah penyaluran masyarakat yang terjaring oleh pemerintah kecamatan.



Gambar 1. Lokasi lahan

3.2. Hasil Rancangan

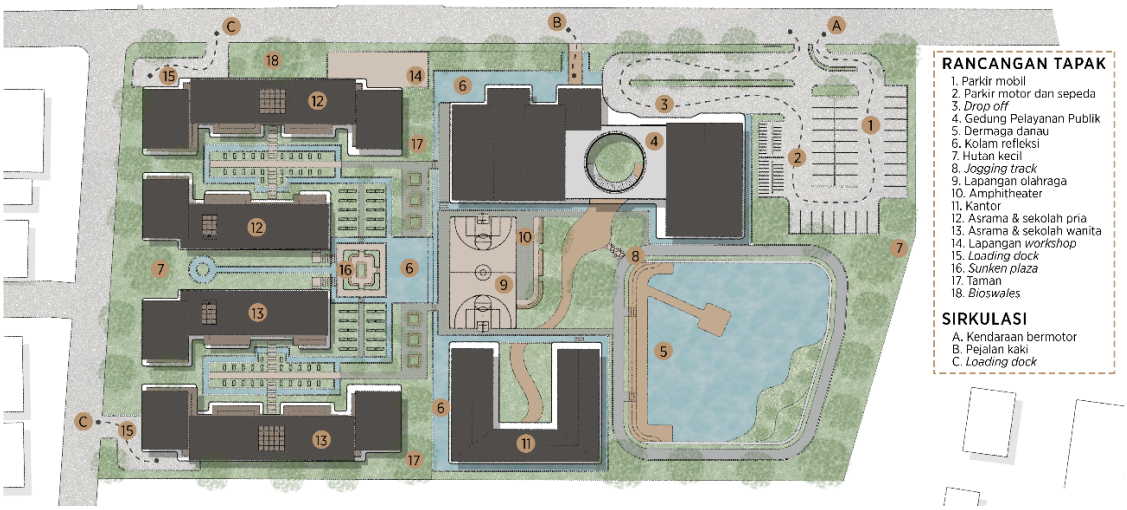
Terdapat lima strategi yang akan dilakukan untuk menerapkan konsep *co-living* ke dalam rancangan Rumah Niscala. Strategi tersebut yaitu: (1) melakukan pengelompokkan program ruang, (2) memperhatikan interaksi antar pengguna, (3) memperhatikan hubungan ruang dalam, (4) melakukan pemisahan sirkulasi, (5) memperhatikan elemen keberlanjutan.



Gambar 1. Strategi perancangan

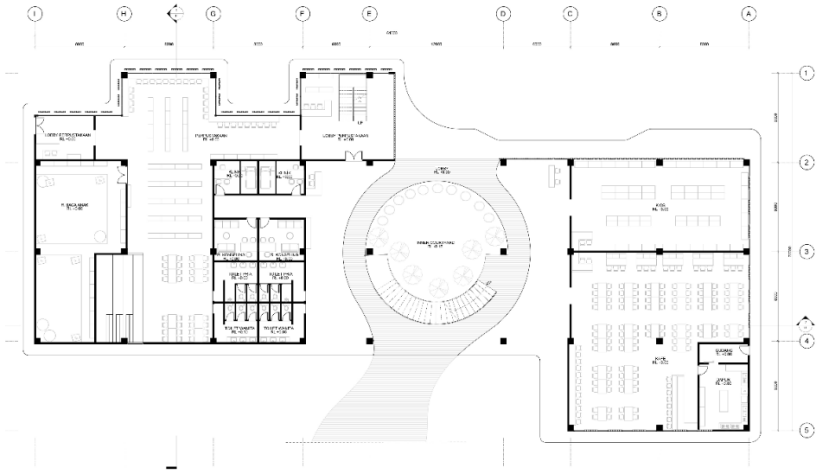
Program ruang akan dikelompokkan sesuai zonasi, gender, dan usia WBS. Lahan akan dipecah menjadi dua zonasi besar. Sisi sebelah kanan diperuntukkan bagi zonasi *semi* publik, yang difokuskan pada fasilitas yang dapat dikontribusikan kembali kepada masyarakat. Zonasi ini dapat diakses oleh seluruh pengguna (tenaga kerja dan WBS), pengunjung dengan kendaraan bermotor, serta masyarakat umum. Sisi sebelah kiri diperuntukkan bagi zonasi *semi private,* yang difokuskan untuk fasilitas bagi WBS. Zonasi ini hanya dapat diakses oleh seluruh pengguna saja. Kedua zonasi ini juga akan dibedakan berdasarkan massa bangunannya. Pada sisi sebelah kiri, massa dibuat lebih kaku dan simetris, sedangkan pada sisi sebelah kanan, massa dibuat lebih *playful*. Hal tersebut dikarenakan massa di sisi kanan ditujukan untuk menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar. Untuk menyediakan ruang berinteraksi, seluruh bangunan pada lahan akan memiliki *inner courtyard* pada bagian tengah. *Inner courtyard* ini sekaligus ditujukan sebagai penghubung antar ruang.

Kendaraan hanya dapat keluar masuk melalui jalan pada sisi utara dari lahan (Jl. Pahlawan). Area parkir akan diletakkan pada sisi sebelah kanan atas lahan agar mempermudah aksesibilitas pengguna, serta agar area parkir tidak menutupi wajah bangunan di sepanjang Jalan Pahlawan. Akses pejalan kaki ke dalam lahan juga disediakan pada sisi ini bagi pengunjung yang datang dengan transportasi publik bus Trans Sidoarjo. Pemisahan ini dilakukan agar tidak terjadi persilangan sirkulasi antara pejalan kaki dengan pengguna kendaraan bermotor. Selain itu, pemisahan ini sekaligus meresponi kepentingan untuk meminimalkan akses kendaraan bermotor di dalam lahan.



Gambar 2. Rencana tapak

Pada sisi kanan bagian atas, ditempatkan gedung pelayanan publik sebagai bangunan utama. Pada bangunan gedung pelayanan publik disediakan fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat. Fasilitas tersebut yakni, (1) Kios, yang akan menjual *souvenir* berupa hasil karya WBS dalam kelas *workshop* juga menjual hasil panen dari pelatihan *urban farming*. (2) Kafe, yang akan menjual olahan makanan dan minuman yang dapat dinikmati pengunjung sekaligus akan digunakan sebagai tempat pelatihan barista bagi WBS pria. (3) Klinik dan ruang konseling, yang dapat diakses masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan serta konseling dengan psikolog. (4) Perpustakaan dua lantai, yang akan digunakan sebagai tempat belajar dan membaca buku bagi WBS dan pengunjung. Perpustakaan dilengkapi dengan ruang baca anak, area baca *amphitheater*, ruang diskusi, ruang komputer untuk pelatihan keterampilan komputer bagi WBS, dan aula yang dapat digunakan untuk sosialisasi atau penyuluhan bagi pengunjung. Pada bangunan ini juga disediakan sebuah *inner courtyard* berbentuk lingkaran yang akan menjadi area penyambut sekaligus titik kumpul bagi pengunjung.



Gambar 3. Denah lantai satu gedung pelayanan publik



Gambar 4. *Inner courtyard* gedung pelayanan publik



Gambar 5. Area baca perpustakaan

Pada sisi kanan bagian bawah terletak bangunan kantor. Kantor akan ditujukan sebagai tempat bekerja para tenaga kerja, juga ditujukan bagi pengunjung yang datang untuk mengurus administrasi maupun bertemu kepala panti. Ruang kerja bagi pekerja sosial dan pembimbing pelatihan diletakkan pada area sebelah kiri dari kantor ini, agar memiliki pemandangan langsung ke arah asrama & sekolah WBS.



Gambar 6. Denah kantor

Berbeda dengan sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri lahan berada pada ketinggian yang lebih rendah untuk membedakan peruntukan lahannya. Di tengah perbedaan kontras ini, diberikan sebuah lapangan olahraga sebagai area komunal yang akan digunakan WBS untuk senam dan pelatihan olahraga, sekaligus menjadi area transisi dari sisi lahan sebelah kiri ke sebelah kanan. Sisi sebelah kiri merupakan area yang paling jauh dari sumber kebisingan dari jalur kereta api. Maka dari itu, area ini diperuntukkan bagi WBS agar memberikan area yang lebih khusus bagi penghuni. Pada sisi ini terdapat bangunan asrama dan sekolah yang dipisahkan berdasarkan gender. Bagi WBS pria terletak di bagian atas dan bagi WBS wanita terletak di bagian bawah lahan. Asrama dan sekolah pria diletakkan di area atas karena membutuhkan area *outdoor* yang lebih luas untuk area lapangan dari *workshop*. Asrama dan sekolah wanita diletakkan di area bawah sehingga berada lebih dekat dengan kantor pengelola untuk mempermudah pengawasan dan perlindungan bagi WBS wanita. Akan tetapi, meskipun dipisahkan, WBS pria dan wanita tetap dapat berinteraksi melalui kegiatan bersama di area komunal. Salah satunya pada *sunken plaza* yang terletak di antara bangunan asrama dan sekolah pria dan wanita.



Gambar 7. Asrama & sekolah WBS

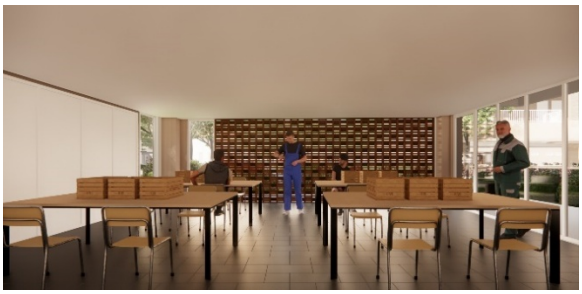


Gambar 8. *Sunken plaza*

Pada bangunan asrama dan sekolah, lantai satu ditujukan untuk sekolah, sedangkan lantai dua ditujukan untuk asrama. Pada sekolah pria, disediakan *workshop* menganyam, *workshop* industri, *workshop* furnitur, juga kelas untuk mengikuti pendidikan paket, kelas bahasa inggris, dan pelatihan musik. Pada sekolah wanita, disediakan *workshop* menjahit, *workshop* salon, *workshop* membatik, juga kelas untuk mengikuti pendidikan paket, kelas bahasa inggris, kelas menyulam, dan pelatihan musik. Fasilitas lainnya adalah mushola untuk ibadah dan pendalaman agama, ruang *laundry*, dapur, dan gudang. Pada bangunan ini juga terdapat area makan untuk WBS dan pekerja sosial. Area ini sengaja dibuat *semi outdoor* dan bersebelahan langsung dengan area *urban farming* untuk mempermudah distribusi hasil panen untuk diolah langsung dalam pelatihan tata boga oleh WBS di dapur. *Urban farming* sendiri akan menjadi area pelatihan keterampilan berkebun bagi WBS. Baik sekolah pria maupun sekolah wanita, masing-masing mendapatkan area loading barang untuk dapur dan workshop dengan sirkulasi terpisah.



Gambar 9. *Urban farming*



Gambar 10. *Workshop*

Tabel 2. Data Pelatihan untuk WBS

Pelatihan	***Remaja***		***Dewasa***		***Keterangan***
	Wanita	***Pria***	***Wanita***	***Pria***	
Pendidikan paket	Ada	Ada			Paket A, B, C
Olahraga	Ada	Ada			Sepak bola dan basket
Musik	Ada	Ada			Gitar dan *keyboard*
Membatik			Ada		
Menyulam			Ada		
Menganyam		Ada		Ada	
Barista		Ada		Ada	
Furnitur				Ada	Meja dan kursi
Industri				Ada	Sepatu dan tas
Tata rias dan salon	Ada		Ada		
Menjahit	Ada		Ada		
Berkebun			Ada	Ada	*Urban farming*
Tata boga	Ada	Ada	Ada	Ada	
Bahasa inggris	Ada	Ada	Ada	Ada	
Komputer	Ada	Ada	Ada	Ada	
TOTAL	8	8	8	8	

Asrama pria dan wanita juga dipisahkan berdasarkan usia WBS untuk menghindari tindakan seperti *bullying*. WBS dewasa akan tinggal pada bangunan yang berbeda dengan WBS remaja. Untuk WBS dewasa, satu kamar dapat dihuni empat orang menggunakan kasur *single* dengan total 11 kamar yang dibagi ke dalam dua blok. Untuk WBS remaja, satu kamar dapat dihuni enam orang menggunakan kasur *bunk bed,* dengan total delapan kamar yang dibagi ke dalam dua blok. Secara keseluruhan, asrama dapat menampung 184 WBS yang terdiri dari 88 WBS dewasa pria dan wanita serta 96 WBS remaja pria dan wanita. Di antara kedua blok diberikan pemisah berupa tangga sirkulasi serta pada masing-masing blok disediakan kamar mandi bagi WBS. Area selain kamar pada keseluruhan lantai dua merupakan koridor *semi outdoor* yang diperuntukkan sebagai ruang komunal bagi WBS. Pada masing-masing bangunan diberikan juga satu kamar pekerja sosial untuk mempermudah pengawasan WBS.



Gambar 11. Denah lantai satu dan dua asrama dan sekolah pria



Gambar 12. Area makan WBS



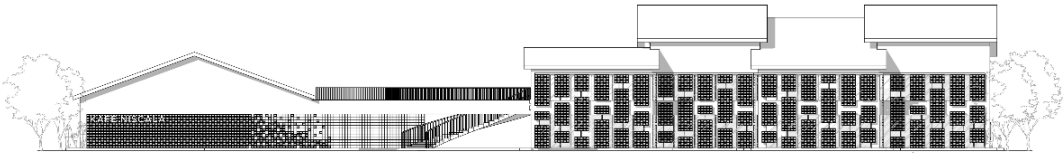
Gambar 13. Kamar tidur WBS

Rumah Niscala juga dirancang dengan mengikuti lima kriteria Green Building. Pertama, tepat guna lahan, dilakukan dengan memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam lahan. Penggunaan elemen lanskap seperti taman, hutan kecil, dan *sunken plaza* ditujukan untuk mengurangi *heat island effect*, menjadi *buffer* polusi dan bising, serta menjadi area komunal bagi penghuni. Urban farming juga dimaksimalkan sehingga Rumah Niscala memiliki ketahanan pangan dan dapat memenuhi kebutuhan penghuninya sendiri. Selain itu, akses pejalan kaki, pengguna transportasi publik, dan pesepeda juga dimaksimalkan. Pesepeda juga disediakan jalur khusus untuk bersepeda yakni pada jogging track yang mengelilingi danau.



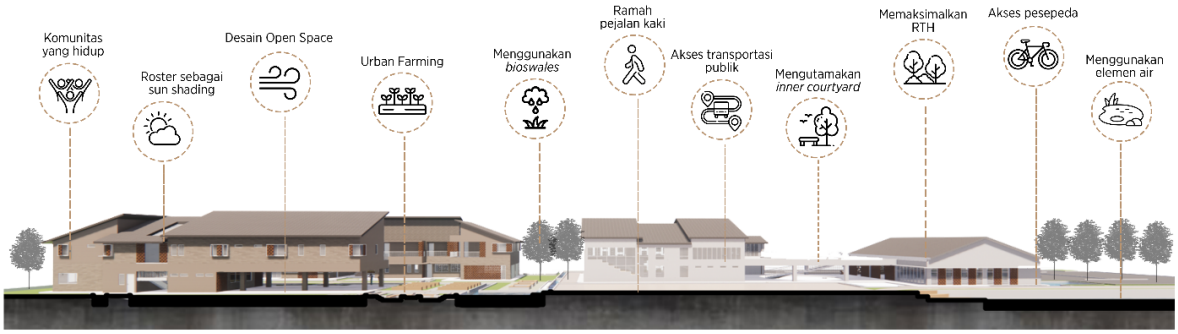
Gambar 14. Dermaga danau

Kedua, efisiensi dan konservasi energi, dilakukan dengan menggunakan desain yang *open space*. Desain ini diraih dengan mengkombinasikan penggunaan loster dan kaca sebagai dinding. Penggunaan loster cukup penting untuk pencahayaan dan penghawaan alami, serta memberikan ventilasi silang, karena pada ruangan seperti *workshop* furnitur di sekolah WBS, akan ada banyak pekerjaan berat yang menghasilkan debu. Beberapa ruangan *workshop* juga dikombinasikan dengan pintu kayu yang dapat dibuka-tutup sesuai kebutuhan, sehingga ruangan menjadi *semi outdoor* dan kegiatan pelatihan dapat dilakukan dengan lebih leluasa. Tampak depan bangunan gedung pelayanan publik juga diberikan penggabungan antara loster dengan *glass block* yang disusun bergradasi. Hal ini dilakukan agar memberikan kesan transparan, menyambut, serta menjadi sebuah daya tarik bagi masyarakat sekitar. Pada fasad bangunan perpustakaan yang menghadap ke jalan juga diberikan juga loster sebagai *secondary skin* untuk memberikan elemen estetika.



Gambar 15. Tampak depan gedung pelayanan publik

Ketiga, konservasi air, dilakukan dengan menyediakan *bioswales* untuk menampung air hujan. Selain itu, terdapat juga sungai kecil yang alirannya menerus mengelilingi seluruh bangunan pada lahan hingga pada danau eksisting. Sungai ini berfungsi sebagai kolam refleksi sekaligus meningkatkan penghawaan alami pada lahan. Keempat, sumber dan siklus material, dilakukan dengan menggunakan atap miring dengan material bitumen yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang pada seluruh bangunan Rumah Niscala. Kelima, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, yang dilakukan juga dengan memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami di dalam ruang.



Gambar 16. Diagram penerapan kriteria Green Building

4. Kesimpulan

Pusat Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) "Rumah Niscala" merupakan sebuah perancangan panti sosial dengan menerapkan konsep *co-living house.* Keberadaan bangunan ini menjadi alternatif desain sebuah panti sosial yang terbuka, tidak memberikan kesan seperti penjara, sekaligus tidak memberikan kesan sekadar sebuah tempat tinggal gratis.

Seluruh rancangan di dalam panti ini, ditujukan sebagai sebuah fasilitas yang mendukung proses pelatihan dan pembimbingan bagi WBS. Melalui panti ini, WBS didorong untuk saling berinteraksi sebagai sebuah komunitas yang saling mendukung. Tidak hanya dibimbing, WBS juga didorong untuk menghasilkan barang dan jasa yang hasilnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat sekitar. Setelah mengikuti pelatihan sesuai durasi yang telah ditentukan, mereka akan disalurkan ke perusahaan, dikembalikan kepada keluarga, atau direlokasikan ke rusun-rusun untuk dapat hidup mandiri dan kembali berkarya di dalam masyarakat dengan keterampilan yang sudah mereka miliki. Tidak hanya memberdayakan WBS, panti ini juga diharapkan dapat mengundang partisipasi masyarakat dengan memberikan pelayanan melalui fasilitas seperti perpustakaan, konseling, klinik, kafe dan kios, serta area terbuka hijau. Perancangan panti ini juga menjadi pelopor bangunan hijau yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada akhirnya, Rumah Niscala dapat menjadi panti sosial yang memenuhi kebutuhan masyarakat PMKS, memberdayakan masyarakat, serta berkontribusi dalam mengurangi masalah kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

Referensi

Ataman, C. & Dino, I. G. (2019). Collective Residential Spaces in Sustainability Development: Turkish Housing Units within CoLiving Understanding. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol* 296 no 1., 2.

BPS Kabupaten Sidoarjo. (2023). Profil Kemiskinan Maret 2022 Kabupaten Sidoarjo. In: B. K. Sidoarjo, ed. Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, p. 2.

BPS Provinsi Jawa Timur. (2019). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur, 2017.* https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html

Dinas Sosial Buleleng. (2018). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.* https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-88

Fauziah, S.M., 2020. *Peran Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012. Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. 2012. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567. Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018. (2018). *Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789. Jakarta.

Sukoco, D.H. (2003). Kemitraan dalam Pelayanan. Jakarta: PT Refika Aditama.